



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE GUNAJA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 157991

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.105.590.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 183.760.000
2. Tanah Seluas 1.025 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.150.000
3. Tanah Seluas 1.875 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 3.900 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 187.200.000
5. Tanah Seluas 5.310 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 254.880.000
6. Tanah Seluas 3.200 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 153.600.000
7. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 1.160 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 116.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 471.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000

4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
205.000.000

5. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
218.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **119.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **917.909.056**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.613.999.056**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.613.999.056**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.